SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 151 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 159

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 159 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMENYAN
Jl. Terusan Padasuka No.35 Telp/Fax.(022)7273666 Cimenyan Kabupaten Bandung
Email: kec.cimenyan@bandungkab.go.id Website: www.kecamatancimenyan.bandungkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :800.1.11.1/347/Progkeu

Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Nama : Solihin,S.Sos
Jabatan : Camat Cimenyan

Memerintahkan

Kepada :
Nama : Sesuai daftar terlampir
Jabatan : Sesuai daftar terlampir
Hari,tanggal :
Tempat : Kecamatan Cimenyan
Untuk : Melaksanakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai Tugas dan Fungsinya.

Cimenyan,2 Juni 2025
Camat Cimenyan,

SOLIHIN,S.Sos
NIP.197012121991011001

LAMPIRAN SURAT PERINTAH CAMAT CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 800.1.11.1/347/Progkeu
TANGGAL : 2 juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

Pengarah : Camat Cimenyan
Penanggungjawab : Camat Cimenyan
Ketua : Sekretaris Kecamatan
Anggota :
1. Kasi Pemberdayaan
2. Kasi Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Sosbud
5. Kasi Trantibum
6. Kasubag Program dan Keuangan
7. Kasubag Umpeg
8. Lurah Cibeunying
9. Lurah Padasuka
10. Seklur Cibeunying
11. Seklur Padasuka

Camat Cimenyan

SOLIHIN,S.Sos.
NIP.197012121991011001

Pemerintah
Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

PERATURAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN CIMENYAN
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka melaksanakan proses Perencanaan di tingkat Kecamatan, dan agar menghasilkan perencanaan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan maka analisis kebutuhan terhadap perencanaan Tahunan yang merupakan rencana Kerja Kecamatan yang merupakan bagian dari SKPD sesuai dengan perundang – undangan, maka proses perencanaan tersebut melalui tahapan yang dimulai dari Rancangan awal, Rancangan dan Renja sebagai bagian dari tahap selanjutnya dari sebuah proses yang melalui analisis kebutuhan, dan Dokumen ini merupakan Perubahan Renja Kecamatan Cimenyan yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Cimenyan sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung.

Demikian Perubahan Renja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan , kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindunganNya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Cimenyan, Juni 2025
Camat Cimenyan

SOLIHIN,S.Sos.
NIP. 197012121991011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU..... 6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cimenyan..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan CImenyan..... 20
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimenyan..... 22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan..... 35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 38
3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan CImenyan..... 40
3.3 Program Kegiatan..... 46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 55
BAB V PENUTUP..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Utama Kecamatan Cimenyan	8
Tabel 2.2	Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja	9
Tabel 2.3	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kec cimenyan s.d Tahun 2025 (Tabel TC.29)	14
Tabel 2.4	Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimenyan (TC.30)	21
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Th.2025	26
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Th.2025	33
Tabel 3.1	Dukungan program-program PD yang mendukung Terhadap prioritas pembangunan kabupaten dan prioritas nasional	36
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimenyan	38
Tabel 3.3	Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025	46
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	49
Tabel 4.1	Rencana Program Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Cimenyan	59

BAB I
PENDAHUlUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kinerja Pemerintahan di Kecamatan Cimenyan sesuai dengan Tupoksinya berkinerja dan bekerja sesuai dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Perubahan rencana strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2021 – 2026.

Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) sangat penting guna mendukung arah dan kepastian program kerja PD khususnya Kecamatan Cimenyan di Tahun 2026.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sehingga dalam penyusunannya sangat memperhatikan terhadap isu strategis dan potensi yang ada.

Peyusunan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2021–2026 dan juga menyelaraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan Kerja Tahun 2025 di Kecamatan Cimenyan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
20. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 151 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bupati Bandung Nomor 92 tanggal 1 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tanggal 28 Mei Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perubahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Kecamatan
Cimenyan adalah :

a. Untuk merencanakan/merumuskan Program,Kegiatan serta Sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimenyan sesuai dengan Perubahan Renstra 2021-2026 serta bersinergi dengan visi,misi serta arah kebijakan kabupaten Bandung;
b. Untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja,memantau kemajuan serta mengidentifikasi hambatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai kecamatan Cimenyan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Cimenyan TA. 2025 adalah:

a. Membantu Kecamatan Cimenyan untuk mencapai Sasaran Strategis yang selaras dengan visi,misi Kabupaten Bandung;
b. Untuk memudahkan pelaksanaan Program,Kegiatan,Sub Kegiatan yang di rumuskan secara efektif dan efisien;
c. Menciptakan Akuntabilitas kinerja kecamatan Cimenyan serta sebagai media komunikasi internal untuk menyampaikan kegiatan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

1.4.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Rancangan Kecamatan Cimenyan, proses penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan, keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Rancangan dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Cimenyan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Cimenyan Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Cimenyan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cimenyan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimenyan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cimenyan;

3.3 Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CIMENYAN TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun Lalu dan Capaian Renstrsa kecamatan Cimenyan

Bahwa Kecamatan Cimenyan telah mereview terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025) serta capaian Renstra kecamatan Cimenyan. Bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Cimenyan.

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil input sidalmonep Bapperida.

Hasil Evaluasi yang tersaji memberikan gambaran :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**
   Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target;

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**
   Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya kurang maksimal;

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**
   Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah, dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan;

4. **Faktor-faktor penyebab tidaktercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**
   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait, kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK dimana Blanko sering tidak mencukupi dan Jaringan yang terkadang lambat;

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**
   Capaian Kinerja di Kecamatan Cimenyan yang secara keseluruhan belum mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja;

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.**
   Meskipun pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :
   a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan;
   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik belum optimal;
   c. Perubahan Kebijakan/Aturan.

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cimenyan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024,bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Cimenyan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel 2.1 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Rancangan OPD sampai dengan tahun berjalan).

Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada DPA Kecamatan Cimenyan TA 2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024 disesuaikan dengan hasil infut data sidalmonep Bapperida kabupaten Bandung.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83	90,04	108,48
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Poin	72	76,50	106,50
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi	%	90	90	100
4	Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik	%	78	77,71	99,62

Tabel 2.2

Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.126.193.232	7.722.277.686	95,03
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.500.000	10.028.000	51,42
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.160.000	83,2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	796.000	19,9
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	2.416.000	60,4
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	2.656.000,00	66,4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.714.703.232	6.480.582.114	96,51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.705.703.232	6.477.589.114	96,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	3.000.000	1.803.000	60,1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	1.190.000	39,66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.820.000	6.450.000	73,13
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.000	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8.750.000	6.450.000	73,71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.750.000	51.426.600,	65,30

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	4.850.400	64,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	44.786.200	99,52
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000	1.110.000	7,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.250.000	680.000	20,92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601. 000	600. 000	99,83
Pengadaan Mebel	601. 000	600. 000	99,83
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	2.380.000	79,33
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	2.380.000	79,33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520. 920. 000	437. 723. 372	34,36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2. 436. 000	48,72
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.000.000	37. 627. 37	6,26
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428. 920. 000	397. 660. 000	40,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.360.000	26.038.700	39,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.000.000	7.591.100	19,46
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.340.000	86,8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.360.000	14.107.600	66,04

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	451.715.753	320.561.100	70,96
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	6.900.000	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.900.000	0	0
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.936.053	3.575.000	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.936.053	3.575.000	60,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	438.879.700	316.986.100	72,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	438.879.700	316.986.100	72,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.873.636.876	5.583.426.714	95,06
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	42.756.000	85,12
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	42.756.000	85,12
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.754.636.876	5.493.406.914	95,46
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	56.230.000	42.842.680	76,19
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.914.261.876	2.887.274.694	99,07
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.770.175.000	2.563.289.540	92,53
Evaluasi Kelurahan	13.970.000	0	0
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	69.000.000	47.263.800	68,50
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	59.000.000	37.264.000	63,16

Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.000.000	9.999.800,	99,98
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.000.000	42.759.000	97,18
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	44.000.000	42.759.000	97,18
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	44.000.000	42.759.000,	97,18
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.587.000	39.616.000	41,88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.587.000	39.616.000	41,88
Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,sosialisasi,konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15.522.000	15.013.000	96,72
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	39.280.000	6. 603. 000	16,81
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39.785.000	18. 000. 000	45,24
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	114.900.000	48.900.000	42,56
Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	114.900.000	48.900.000	42,56
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	750.000	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	42.550.000	6.500.000	15,28

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55.000.000	42.400.000	77,09
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.000.000	0	0
TOTAL	14.705.032.861	13.779.140.500	93,70

Tabel.TC 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2024 dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Cimenyan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Rutin									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	72,85	72,75	72	76,5	106,25%	72,'80	0	0,00%
		Persentase aset BMD dalam kondisi baik	90	90	90	90	100,00%	90	0	0,00%
7.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen anggaran /keuangan yg di selesaikan tepat waktu**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	10	2	2	2	100%	2	4	40,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40,00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40,00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40,00%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian administrasi keuangan daerah**	100%	100%	100%	86,'71%	86,'71%	100%	0	0,00%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150	30	30	30	93,34%	30	87	58,00%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40,00%

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	5	1	1	1	100%	1	2	40,00%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	1	1	1	100	1	2	40,00%
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	90	90	90	90	100	90	0	0,00%
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	4	4	4	100	4	8	40,00%
7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian PAD**	100%	100%	0	0	0	100	0	0,00%
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelola Retribusi Daerah	5	1	0	0	0	1	1	20,00%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai pengukuran evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	96,67	96,67	100%	0	0,00%
7.01.01.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	0	0	0	0	30	0	0,00%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	150	28	30	28	93,33	30	56	37,33%
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	30	30	28	93,33	30	58	38,67%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	53,'29%	53,'29%	100%	0	0,00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	60	12	12	4	66,67%	12	16	26,67%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	15	3	12	12	100	3	16	106,67%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg di sediakan	60	12	12	4	33	12	26	43,33%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yg disediakan	60	12	12	10	83,33	12	27	45,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	12	0	0	0	12	12	20,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75	6	13	4	26,67	15	10	13,33%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase BMD dalam kondisi baik**	90	90	90	90	100	90	0	0,00%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeul yang di sediakan	15	3	3	3	100	3	6	40,00%

7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	20	4	4	4	100	4	8	40,00%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%	88,'49%	88,'49%	100%	0	0,00%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	2	1	1	100	12	3	60,00%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	60	12	12	12	100	12	29	48,33%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	60	12	12	12	100	12	29	48,33%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	90	90	90	90	100	90	0	0,00%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di peliharan dan di bayarkan pajaknya	30	6	6	6	100	6	15	50,00%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	20	4	4	4	100	4	8	40,00%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara /di rehabilitasi	15	3	3	3	100	3	6	40,00%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90**	89,14	83	90,04	108,48%	89,'50	0	0,00%
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yg tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan**	100%	100%	100%	100	100	100%	0	0,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	2500	500	1	1	100	500	501	20,04%
7.01.02.2.03	**Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum**	100%	100%	100%	100	100	100%	0	0,00%
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaansarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dg Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	4	1	1	1	100	1	2	50,00%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Presentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	100%	100%	100%	94,45	94,45	100%	0	0,00%

7.01.02.2.04.03 P	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yg di limpahkan	20	4	4	4	100	4	9	45,00%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa yang beradministrasi baik**	100	100%	78	77,71	99,63%	50%	0	0,00%
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa**	100	100%	100%	82,'10	82,'10	100%	0	0,00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3	1	0	0	0	1	1	33,33%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	1	1	100	0	1	#DIV/0!
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	100%	100%	100%	100	100	100%	0	0,00%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5	1	2	2	100	1	4	80,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	20	4	4	4	100	4	8	40,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kelurahan	25	5	5	5	100	5	11	44,00%
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	10	2	2	2	100	2	4	40,00%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan**	100%	100%	100%	100	100	100%	0	0,00%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg di tingkatkan kapasitasnya	8	2	2	2	100	2	4	50,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	4	1	1	1	100	1	2	50,00%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	90	89,14	83	90,04	108,48%	89,'50	0	0,00%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase penegakkan Perda yg berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	100%	100%	100%	86,55	86,55	100%	0	0,00%

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	2	2	2	100	2	4	40,00%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	90	89,14	83	90,04	108,48%	89,'50	0	0,00%
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yng ditugaskan kepala daerah**	100%	100%	100%	86,'40	86,'40	100%	0	0,00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135	45	0	0	0	0	45	33,33%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,sosialisasi,konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yg mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bintek,sosialisasi,konsultasi) wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	0	45	45	100	45	45	50,00%
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yg mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	225	45	45	45	100	45	90	40,00%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	27	45,00%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yg beradministrasi baik**	100%	100%	78	77,71	99,63%	1	0	0,00%
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100%	100%	100%	100%	100	100%	0	0,00%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	5	1	1	1	100	1	2	40,00%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5	1	1	1	100	1	2	40,00%

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	4	1	1	1	0	1	3	75,00%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	10	2	2	2	100	2	4	40,00%
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	5	1	1	1	100	1	2	40,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cimenyan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauh mana capaian Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi kesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari sebuah perencanaan.

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cimenyan merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.2 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cimenyan.

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cimenyan
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	Indek Kepuasan Masyarakat	-	82	82	83	89,50	90	89,14	90,04	N/A	90,10	
2	Nilai AKIP	-	70	72	72	72,80	72,85	72,75	76,50	N/A	76,60	
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	N/A	90%	
4	Persentase Desa yang Beradministrasi Baik	-	80%	76%	78%	79%	80%	80,58	77,71	N/A	80%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kinerja Kecamatan Cimenyan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cimenyan telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan tidak terlepas dari Program dan Kegiatan mandatori dari pusat dan daerah di antaranya Program penanggulangan kemiskinan dan stunting,Program Kartu Tani,Insentif Guru Ngaji serta Program Dana bergulir bagi pelaku UMKM.

Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan :

a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor :137/Kep.769-TAPEM/2023, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi;
b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
   1. Non Perizinan (Penerbitan KK,KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya);
   2. Melaksanakan Program Kewilayahan;
   3. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan;
   4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

a. SDM Aparatur;
b. Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketapatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan;
c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan;
d. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan;
e. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
f. Belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan;
g. permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik;
h. Belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainya) berupa Taman alun – alun j. belum adanya pasar Tradisional dan sehat.

Hambatan :

a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan);
b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan;

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan.

4. Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada.

A. Kekuatan

1. Adanya dukungan anggaran;
2. SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik;
3. Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan;
4. Sinergitas dan solidaritas aparatur.

B. Kelemahan

1. Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru;
2. Kapasitas SDM Aparatur;
3. Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap;
4. Tidak adanya sarana publik yang memadai (RTH).

C. Tantangan

1. Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
2. Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahui tentang SOP pelayanan;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih;
4. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang);

D. Peluang

1. Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
2. Antusiasme masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak);
3. Koordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab;
2. Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur;
3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan;
4. Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang;
5. Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan;
6. Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan;
7. Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP,KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan.Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut dikarenakan untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang menunjang Program Prioritas serta penyesuaian anggaran.

Tabel 2.4 (TC 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	4	**5**	**6**	**7**	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Kecamatan Cimenyan	**Nilai AKIP**		**6.526.910.997**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Kecamatan Cimenyan	**Nilai AKIP**		**8.327.095.824**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Tersedianya dokumen anggaran /keuangan yg di selesaikan tepat waktu**	100%	**19.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Tersedianya dokumen anggaran /keuangan yg di selesaikan tepat waktu**	100%	**19.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dukumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dukumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Persentase capaian administrasi keuangan daerah**	100%	**5.931.810.997**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase capaian administrasi keuangan daerah**	100%	**7.607.995.824**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cimenyan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.922.810.997	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cimenyan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.598.995.824	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	100%	**3.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	100%	**3.000.000**	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan analisa prognosis realisasi anggaran	4 Laporan	3.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan rekonsiliasi dan analisa prognosis realisasi anggaran	4 Laporan	3.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	**5.000.000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	**5.000.000**	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Derah	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	1 Dokumen	5.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Derah	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	1 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Nilai pengukuran evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	100%	**30.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Nilai pengukuran evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	100%	**45.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	15.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	30 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	30 Dokumen	5.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah orang yg mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah orang yg mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah**	100%	**82.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah**	100%	**82.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	12 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	12 Paket	7.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	3 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg di sediakan	12 Paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg di sediakan	12 Paket	9.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yg disediakan	12 Paket	14.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yg disediakan	12 Paket	14.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	138 Laporan	9.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	138 Laporan	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	13.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	13.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase BMD dalam kondisi baik**	100%	**32.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase BMD dalam kondisi baik**	100%	**32.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket mebeul yang di sediakan	3 unit	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cimenyan	Jumlah paket mebeul yang di sediakan	3 unit	15.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	4 Unit	17.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	4 Unit	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	100%	**388.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	100%	**497.600.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1000 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1000 Laporan	5.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	12 Laporan	87.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	348.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12 Laporan	405.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**34.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	100%	**34.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di peliharan dan di bayarkan pajaknya	6 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di peliharan dan di bayarkan pajaknya	6 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	4 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	4 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara /di rehabilitasi	3 unit	14.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara /di rehabilitasi	3 unit	14.500.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cimenyan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**222.478.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cimenyan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**503.576.641**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan**	500 Laporan	**16.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan**	500 Laporan	**6.500.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dg Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 Dokumen	10.000.000						
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	6.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dokumen	6.500.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cimenyan	**Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum**	100%	**5.978.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kecamatan Cimenyan	**Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan**	100%	**15.978.000**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dg Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 Dokumen	5.978.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dg Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 Dokumen	15.978.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Cimenyan	**Presentase pelaksanaan kegiatan pemerintah- an di tingkat kecamatan**	100%	**200.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kecamatan Cimenyan	**Presentase pelaksanaan kegiatan pemerintah- an di tingkat kecamatan**	100%	**481.098.641**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yg di limpahkan	4 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yg di limpahkan	4 Laporan	481.098.641	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cimenyan	**Jumlah Desa yang Cepat Berkembang**	100%	**5.875.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cimenyan	**Jumlah Desa yang Cepat Berkembang**	100%	**5.945.522.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cimenyan		100%	**45.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Cimenyan		100%	**45.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisifasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisifasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	**Presentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	100%	**5.800.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kecamatan Cimenyan	**Presentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	100%	**5.815.522.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	8 Unit	1.698.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	8 Unit	1.038.222.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10 Pokmas	3.962.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10 Pokmas	4.597.300.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	4 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	4 Laporan	80.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan**	100%	**30.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan**	100%	40.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg di tingkatkan kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg di tingkatkan kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1 Laporan	10.000.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	10.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	**000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kecamatan Cimenyan	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	**45.000.000**	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga	12.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga	11.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	120 Keluarga	000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	120 Keluarga	11.000.000	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120 Keluarga	000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120 Keluarga	11.000.000	

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cimenyan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**30.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cimenyan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**30.000.000**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase penegakkan Perda yg berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	100%	**30.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase penegakkan Perda yg berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	100%	**30.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Cimenyan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**67.522.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Cimenyan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	100%	**96.785.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yng ditugaskan kepala daerah**	100%	**67.522.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Cimenyan	**Prosentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yng ditugaskan kepala daerah**	100%	**96.785.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cimenyan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	45 orang	15.522.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Cimenyan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	45 Orang	000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cimenyan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	40 Orang	10.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cimenyan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	40 Orang	40.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 orang	000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 Orang	000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	Kecamatan Cimenyan	Jumlah orang yg mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45 Orang	17.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	Kecamatan Cimenyan	Jumlah orang yg mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45 Orang	17.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Orang	39.785.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase desa yg beradministrasi baik**	100%	**55.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cimenyan	**Persentase desa yg beradministrasi baik**	100%	**95.000.000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cimenyan	**presentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100%	**55.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Cimenyan	**presentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100%	**95.000.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	1 Dokumen	10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	10.000.000	
	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	000	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	000	
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	55.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	2 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	1 Laporan	10.000.000	
JUMLAH					**12.776.910.997**					**14.997.979.465**	

Kesesuaian Rencana Awal dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Ranwal belum dilakukan analisis kebutuhan, namun secara umum telah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Cimenyan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel TC.33 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Cimenyan pada Tahun
2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat staf harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

1. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan/penyesuaian dengan aturan terkait indikator kegiatan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKPD OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan.

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Tabel Tc.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			NIHIL		

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja Kecamatan tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan diusulkan melalui Dinas dan Badan untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas/Badan atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa - desa di Kecamatan Cimenyan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standart penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tabel 3.1
Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	
PN1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup			
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan social	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi Nomor 4 yaitu ***Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai- nilai keagamaan***, dan kaitan dengan hal tersebut Kecamatan Cimenyan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada pada Misi No 4.

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah mendukung terhadap Visi dan Misi Kabupaten Bandung yaitu dalam arti bahwa Kecamatan Cimenyan mempunyai Tujuan yang sama untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang **"*(BEDAS) Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera*"** .sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Sasaran – sasaran yang merupakan satu Kesatuan yang dapat mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di Kecamatan Cimenyan.

Tujuan Renja Kecamatan Cimenyan yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Cimenyan :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik,
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan,
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa.

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Cimenyan

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan**	**Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	**Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersusunya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	**Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu	**Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan**		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	**Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**		
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersususnnya dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	**Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor**		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
Tersedianya Barang Cetakan dan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
Tersedianya Mebel	Terlaksananya Penyediaan Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Tersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di peliharan dan di bayarkan pajaknya	

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersusunnya laporan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara /di rehabilitasi	
2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**			
	Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakanoleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	
	Tersedianya Dokumen PemeliharaanPrasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
	Tersedianya Dokumen PelaksanaanUrusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat	Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yangTerkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganKewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	
3	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**Jumlah Desa yang Cepat Berkembang**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**			

	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersusunya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	
	Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersusunya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tercapainya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna	
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		
	Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Tercapainya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tercapainya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalammPeningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Tercapainya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Tercapainya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
4	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		**Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**		
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tersusunya Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
5	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**			
	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		

	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	
	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	
	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**			
	Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tersusunya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase desa yang dibina**		
	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu ***(BEDAS) Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera*****'.**
Misi Nomor 4 yaitu ***Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan*** telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka Program dan Kegiatan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Cimenyan.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No.4 Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program,18 kegiatan dan 51 Sub kegiatan antara lain :

Tabel 3.3
Program,Kegiatan dn Sub Kegiatan Kecamatan Cimenyan Tahun Anggaran 2025

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
				12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik	20	Pengadaan Mebel

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22	Penyediaan Jasa Surat
				23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		10	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	29	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				34	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				35	Evaluasi Kelurahan
		14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	36	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				37	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
				38	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		15	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	39	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

			Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				41	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				42	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	43	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	44	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan
				45	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional
				46	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				48	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				49	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
				50	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
				51	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN CIMENYAN TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

KABUPATEN BANDUNG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11
					KECAMATAN CIMENYAN								
1					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	1				**KECAMATAN**								
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Meningkatnya Nilai AKIP**	Kecamatan Cimenyan		**8.305.536.424,00**				**7.464.574.592,00**
7	1	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen anggaran /keuangan yg di selesaikan tepat waktu**	Kecamatan Cimenyan	100%	**8.856.000,00**			100%	**19.500.000,00**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	2 Dukumen	2.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		2 Dukumen	5.000.000,00
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	1.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	4.000.000,00
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	1.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	4.000.000,00
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	1.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	2.500.000,00
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	2.536.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Laporan	4.000.000,00
7	1	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian administrasi keuangan daerah**	Kecamatan Cimenyan	100%	**7.604.805.824,00**			100%	**6.745.474.592,00**

7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Cimenyan	30 Orang/bulan	7.598.995.824,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Orang/bulan	6.736.474.592,00
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan AKhir Tahun SKPD	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	2.085.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.000.000,00
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.000.000,00
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000,00
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	Kecamatan Cimenyan	100%	**3.000.000,00**			100%	**3.000.000,00**
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan analisa prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Cimenyan	4 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	3.000.000,00
7	**1**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cimenyan	100%	**0,00**			100%	**5.000.000,00**
7	1	1	2.04	1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Derah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000,00
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Nilai pengukuran evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	100%	**32.128.700,00**			100%	**45.000.000,00**
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Cimenyan	30 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	15.000.000,00
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kecamatan Cimenyan	30 Dokumen	2.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	5.000.000,00
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Cimenyan	30 Orang	15.018.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	25.000.000,00
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Cimenyan	100%	**69.645.900,00**			100%	**82.500.000,00**

7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	Kecamatan Cimenyan	12 Paket	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	7.500.000,00
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	Kecamatan Cimenyan	3 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	30.000.000,00
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yg di sediakan	Kecamatan Cimenyan	12 Paket	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	9.000.000,00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yg disediakan	Kecamatan Cimenyan	12 Paket	13.145.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	14.000.000,00
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Cimenyan	138 Laporan	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		138 Laporan	9.000.000,00
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Cimenyan	15 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Laporan	13.000.000,00
7	1	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase BMD dalam kondisi baik**	Kecamatan Cimenyan	100%	**32.000.000,00**			100%	**32.000.000,00**
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeul yang di sediakan	Kecamatan Cimenyan	3 unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	15.000.000,00
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Kecamatan Cimenyan	4 Unit	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	17.000.000,00
7	1	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Cimenyan	100%	**487.849.445,00**			100%	**497.600.000,00**
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Laporan	5.000.000,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	Kecamatan Cimenyan	12 Laporan	59.249.445,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	87.000.000,00
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	Kecamatan Cimenyan	12 Laporan	423.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	405.600.000,00
7	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Cimenyan	100%	**67.250.555,00**			100%	**34.500.000,00**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di peliharan dan di bayarkan pajaknya	Kecamatan Cimenyan	6 Unit	47.750.555,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	15.000.000,00

7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Kecamatan Cimenyan	4 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Unit	5.000.000,00
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara /di rehabilitasi	Kecamatan Cimenyan	3 unit	14.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	14.500.000,00
7	1	2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Kecamatan Cimenyan	100%	**486.439.546,00**			100%	**363.128.641,00**
7	1	2	02.2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan**	Kecamatan Cimenyan	500 Laporan	**55.030.000,00**			500 Laporan	**55.030.000,00**
7	1	2	02.2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	55.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	55.030.000,00
7	1	2	02.3		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum**	Kecamatan Cimenyan	100%	**7.176.700,00**			100%	**7.000.000,00**
7	1	2	02.3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dg Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	7.176.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	7.000.000,00
7	1	2	02.4		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kecamatan Cimenyan	100%	**424.232.846,00**			100%	**301.098.641,00**
7	1	2	02.4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yg di limpahkan	Kecamatan Cimenyan	4 Laporan	424.232.846,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		4 Laporan	301.098.641,00
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa yang beradministrasi baik**	Kecamatan Cimenyan	100%	**5.581.822.374,00**			100%	**5.945.522.000,00**
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cimenyan	100%	**9.853.400,00**			100%	**45.000.000,00**
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisifasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunandi Desa	Kecamatan Cimenyan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.853.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00

7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Presentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kecamatan Cimenyan	100%	**5.491.720.974,00**			100%	**5.815.522.000,00**
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	2 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Cimenyan	8 Unit	2.371.386.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN		8 Unit	1.038.222.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan Cimenyan	10 Pokmas	2.986.334.774,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		10 Pokmas	4.597.300.000,00
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Kecamatan Cimenyan	4 Laporan	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		4 Laporan	80.000.000,00
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan**	Kecamatan Cimenyan	100%	**35.248.000,00**			100%	**40.000.000,00**
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg di tingkatkan kapasitasnya	Kecamatan Cimenyan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	5.248.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Laporan	10.000.000,00
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cimenyan	100%	**45.000.000,00**			100%	**45.000.000,00**
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Cimenyan	120 keluarga	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		120 keluarga	12.000.000,00
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Cimenyan	120 keluarga	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		120 keluarga	11.000.000,00

7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Cimenyan	120 keluarga	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		120 keluarga	11.000.000,00
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Cimenyan	120 keluarga	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		120 keluarga	11.000.000,00
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Kecamatan Cimenyan	100%	**15.154.700,00**			100%	**30.000.000,00**
7	1	4	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase penegakkan Perda yg berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	Kecamatan Cimenyan	100%	**15.154.700,00**			100%	**30.000.000,00**
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cimenyan	2 Laporan	15.154.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		2 Laporan	30.000.000,00
7	1	5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Kecamatan Cimenyan	100%	**82.772.000,00**			100%	**96.785.000,00**

7	1	5			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Prosentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yng ditugaskan kepala daerah**	Kecamatan Cimenyan	100%	**82.772.000,00**			100%	**96.785.000,00**
7	1	5	02.2	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cimenyan	40 Orang	36.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		40 Orang	40.000.000,00
7	1	5	02.2	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	Jumlah orang yg mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Cimenyan	45 Orang	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		45 Orang	17.000.000,00
7	1	5	02.2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cimenyan	12 Orang	29.292.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		12 Orang	39.785.000,00
7	1	6			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yg beradministrasi baik**	Kecamatan Cimenyan	100%	**94.055.000,00**			100%	**95.000.000,00**
7	1	6	02.1	2	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**presentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Kecamatan Cimenyan	100%	**94.055.000,00**			100%	**95.000.000,00**
7	1	6	02.1	3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	10.000.000,00
7	1	6	02.1	9	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yg di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	10.000.000,00
7	1	6	02.1	6	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Cimenyan	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Dokumen	55.000.000,00
7	1	6	02.1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Cimenyan	2 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		2 Dokumen	10.000.000,00
7	1	6	02.1	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Kecamatan Cimenyan	1 Laporan	9.055.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD		1 Laporan	10.000.000,00
JUMLAH									**14.565.780.044,00**				**13.995.010.233,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu anggaran sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CIMENYAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**8.305.536.424**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.856.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.960.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.110.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.110.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.140.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.536.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.604.805.824**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.598.995.824
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	725.000
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.000.000**
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**32.128.700**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.110.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.018.700
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**69.645.900**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.145.900
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**32.000.000**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**487.849.445**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.249.445
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	423.600.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.250.555**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.750.555
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.500.000
Jumlah 1		**8.305.536.424**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**486.439.546**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**55.030.000**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.030.000
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**7.176.700**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.176.700
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**424.232.846**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	424.232.846
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.601.260.974**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**29.292.000**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29.292.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**5.491.720.974**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.371.386.200
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.986.334.774
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	34.000.000
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**35.248.000**
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.000.000
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.248.000
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**45.000.000**
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	12.000.000
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	11.000.000
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	11.000.000
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	11.000.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**15.154.700**

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**15.154.700**
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.154.700
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**82.772.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**82.772.000**
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	36.480.000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,dan Nasional	17.000.000
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.292.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**94.055.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**94.055.000**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55.000.000
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.055.000
Jumlah 2		**6.279.682.220**
Jumlah Total (1+2)		**14.585.218.644**

Tabel TC.33
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2025		Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
					Target	Pagu (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/**	Nilai AKIP Persentase BMD dalam kondisi baik	72,80 90	**8.305.536.424,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Sesuai Dengan Pedoman Yang Berlaku dan Ketercapaian Kinerja Hasil Perencanaan	6 Dokumen	**8.856.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.960.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.110.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.110.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.140.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.536.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	**7.604.805.824,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	7.598.995.824,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.085.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	725.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Persentase BMD dalam kondisi baik	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	**90**	**3.000.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	**0,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Rata-rata Capaian SKP ASN /+ 80%	100%	**32.128.700,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	15.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	2.110.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	15.018.700,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	**69.645.900,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	9.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.145.900,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	1.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**487.849.445,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.249.445,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	423.600.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	90	**32.000.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	90	**67.250.555,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	47.750.555,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	14.500.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Nilai IKM	**89,'50**	**486.439.546,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	**55.030.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	500 Laporan	55.030.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
		7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	**7.176.700,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Dokumen	7.176.700,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	**424.232.846,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	424.232.846,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	IKM	**89,'50**	**15.154.700,00**	Kecamatan Cimenyan		

	7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	**15.154.700,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	15.154.700,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM	**89,'50**	**82.772.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	**82.772.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	36.480.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	45 Orang	17.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	29.292.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Jumlah Desa yang Cepat Berkembang	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa yang Cepat Berkembang	**1**	**5.581.822.374,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**9.853.400,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.853.400,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	**5.491.720.974,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2.371.386.200,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	2.986.334.774,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	34.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	**35.248.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7.01.03.2.03.005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	5.248.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	**45.000.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 keluarga	12.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 keluarga	11.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	120 keluarga	11.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	120 keluarga	11.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa yang Cepat Berkembang	**1**	**94.055.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	**94.055.000,00**	Kecamatan Cimenyan		
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1 Laporan	9.055.000,00	Kecamatan Cimenyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						14.565.780.044,00			

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2021–2026, disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Cimenyan maupun nasional.dan rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cimenyan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan permasalahan dan analaisis Kebutuhan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Cimenyan dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Misi Kabupaten Bandung.

CAMAT CIMENYAN

Ttd

SOLIHIN,S.Sos

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Keseusaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak ada
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja				
2	Pengolahan data dan Informasi				
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
4	Mengkaji Hasil Evaluasi renja-perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
5	Penentuan Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah kabupaten/kota				
6	Penelaahan rencana awal RKPD kabupaten/kota				
7	Perumusan Tujuan dan sasaran				
8	Penelaahan usulan masyarakat				
9	Perumusan Kegiatan prioritas				
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/kota				
10 a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan				
10 b	Mempertajam Indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
10 c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisai pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10 d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Dareah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/wali kota				
11	Sasaran program dan kegiatan Peringkat Daerah Kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu				
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka Optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat DaerahKabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan perakiran maju				
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan				

Cimenyan, Juni 2025
Camat Cimenyan

SOLIHIN,S.Sos.
NIP.197012121991011001

NASKAH AKADEMIK

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIMENYAN TAHUN 2025

Disusun sebagai Kajian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIMENYAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari penyusunan proses pembentukan Peraturan Bupati, dengan melakukan analisis terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cimenyan yang lebih baik, dalam tataran konsep substansi serta implementatif dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen perencanaan jangka menengah.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah akademik ini, kami ucapkan terima kasih.

Cimenyan, Juni 2025

PENYUSUN NASKAH AKADEMIK PERUBAHAN RENJA 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Indentifikasi Masalah	2
	1.3 Tujuan dan Keguanaan Penyusunan Naskah Akademik	3
	1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	3
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
	2.1 Kajian Teoritis	4
	2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025	6
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	11
	3.1 Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025	11
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS,SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	14
	4.1 Landasan Filosofis	14
	4.2 Landasan Sosiologis	15
	4.3 Landasan Yuridis	16
BAB V	JANGKAUAN,ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH	21
	5.1 Ketentuan Umum	21
	5.2 Ketentuan Peralihan	22
	5.3 Materi Dalam Dokumen	23
BAB VI	PENUTUP	26
	6.1 Kesimpulan	26
	6.2 Saran	26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang berisikan visi, misi, dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan keuangan daerah, strategi Pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, program lintas PD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selain itu RPJMD sebagai pedoman bagi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yaitu suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD tahun 2021-2026 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sehubungan adanya perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Daerah yang menyebutkan bahwa Dalam hal terjadi perubahan RPJMD, akan secara berkesinambungan terhadap perubahan Renstra SKPD. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan Cimenyan perlu melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan yang terdapat pada Perubahan RPJMD serta RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 selain sebagai pedoman bagi Kecamatan Cimenyan dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya RKPD akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran di tahun perencanaan berkenaan. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara Rencana Kerja dengan perencanaan operasional di Kecamatan Cimenyan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Cimenyan.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan adalah sebagai berikut:

1. Perlu menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya yang saat ini telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini menggantikan acuan yang digunakan untuk penyusunan perencanaan Pembangunan daerah di dalam

2. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cimenyan Tahun 2021-2026 yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Perlu menetapkan IKU Perangkat Daerah dan target kinerja melihat terdapat indikator dengan ketercapaian di tahun 2024 sudah melampaui target akhir di tahun 2026.
4. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Bupati yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan Kecamatan Cimenyan Tahun 2025.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan. Adapun kegunaaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Penetapan Renja dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) dan agar menjamin keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
2. Dengan kedudukannya sebagai Peraturan Bupati, maka menjadi acuan bersama seluruh *stakeholder*s pembangunan, mengikat komitmen bersama dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal, dimana kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang dilakukan pada Kecamatan Cimenyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk dianalisis atau ditelaah untuk mendapatkan data factor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap serta menunjukkan arti pentingnya penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025.

Penyusunan naskah akademik ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta teknik pengumpulan data pada penyusunan akademik ini adalah studi pustaka dan diskusi.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.2.1. Konsep Dasar Perencanaan

Pada dasarnya, sebagai fungsi manajemen, menurut Ginanjar Kartasasmita, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapau tujuan yang dikehendaki. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan. Menurut LAN-DSE (1999), unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan. Ini terkait dengan pemilihan prioritas. Selain itu, terkait juga dengan pemilihan cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya. Hal ini berkenaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik alam, manusia, maupun anggaran. Di samping itu juga terkait dengan pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena, itu tujuan harus jelas, mempertimbangkan seluruh aspek seperti ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi dari semuanya.
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu). Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi rencana.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
3. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

2.2.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing PD. Selanjutnya, Renstra PD menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja PD, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

2.2.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan pemecahan (breakdown) rencana jangka panjang kedalam rencana jangka menengah (Mahmudi, 2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan kata lain, RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Oleh karena itu, Renja- PD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 adalah

a. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah serta adanya acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja PD selama lima tahun ke depan.
b. Menjadi acuan untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
c. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan selama satu tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
d. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu satu tahun.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 disusun berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , yang selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

4. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 dibuat dengan maksud menyelaraskan antara perencanaan strategik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang terdapat pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan perencanaan di Kecamatan Cimenyan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka pendek, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Cimenyan.

5. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 dibuat dengan maksud menyelaraskan antara perencanaan strategik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung dengan perencanaan di Kecamatan Cimenyan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan , sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat desa dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 151 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan;
b. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu;
c. Tujuan dan Sasaraan Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup.

7. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan). Pembentukan Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 memedomani peraturan perundangan lain yang mendukung dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja yang mengukur pencapaian kinerja Kecamatan Cimenyan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pokok-pokok pikiran peraturan perundangan yang dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

3.1.1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD serta rencana perangkat daerah yang terdiri atas Renstra Perangkat Daereh dan Renja Perangkat Daerah.

Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Untuk mewujudkan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dipandang perlu Kecamatan Cimenyan menyusun perencanaan pembangunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja (Renja).

3.1.1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan harus memungkinkan bagi terciptanya efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungiawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.1.2. Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (RKPD dan Renja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah. Selanjutnya, RPJMD memberi

pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Renstra-SKPD dan Renja-SKPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat.

Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran bertujuan untuk:

a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran; dan
c. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Pembangunan nasional (mencakup pembangunan daerah juga) adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dalam penyusunannya, antara lain:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 berlandaskan aspek spiritual dan etika yang berketuhanan sesuai pengamalan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bandung sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimenyan.
2. Perencanaan yang disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 berdasarkan sikap moral dan nurani terhadap masyarakat dalam mencapai keadilan sesuai dengan pengamalan Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Perencanaan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 bertujuan memperkuat dan kesatuan bangsa sesuai pengamalan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.
4. Perencanaan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 mengutamakan musyawarah dalam mengambil Keputusan sesuai pengamalan Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Perencanaan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 bertujuan untuk pembangunan secara merata tidak hanya untuk satu golongan

6. atau sebagian dari masyarakat sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat sesuai pengamalan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan yang dibentuk demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Fakta sosiologis atau kemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaku pembangunan memerlukan arah sekaligus acuan yang jelas. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Salah satu bentuk kebijakan berupa rencana perangkat daerah yang bersifat jangka pendek adalah Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimenyan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 telah memberikan arah dan panduan dalam perencanaan jangka pendek (1 tahun) Kecamatan Cimenyan. Namun dalam rangka untuk memperbaiki dan menyempurnakan substansi yang telah tercantum, maka perlu dilakukan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025. Secara sosiologi, Renja Kecamatan Cimenyan adalah salah satu upaya penyempurnaan pedoman dalam perencanaan strategis Kecamatan Cimenyan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 dengan harapan peraturan tersebut dapat mempertegas arah kebijakan Kecamatan Cimenyan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian misi ke-4 Kabupaten Bandung yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pada penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

8. Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

25. Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 98);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Bandung;
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2022 tentang

33. Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka Renja Kecamatan Cimenyan perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cimenyan Tahun 2025.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik ini adalah menjadikan Renja Kecamatan Cimenyan ini memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Cimenyan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan, termasuk dokumen penganggaran.

5.1. Ketentuan Umum

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2021-2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pengertian istilah yang digunakan dalam peraturan kepala daerah, khususnya di dalam dokumen Renja, meliputi:

1. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
10. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
13. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
14. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

5.2. Ketentuan Peralihan

1. Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Dalam hal pelaksanaan Renja Kecamatan Cimenyan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Renja Kecamatan Cimenyan.

3. Ketentuan pada huruf b dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
4. Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

5.3. Materi dalam Dokumen

Substansi Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Kecamatan Cimenyan, fungsi Renja Kecamatan Cimenyan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan, keterkaitan Renja Kecamatan Cimenyan dengan RPJMD dan dengan Renstra Kecamatan Cimenyan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan derangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Cimenyan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Cimenyan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cimenyan

Memuat penjelasan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan tahun berjalan serta tingkat capaian Renstra kecamatan Cimenyan. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Cimenyan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimenyan

Memuat penjelasan ringkas tentang kinerja pelayanan Kecamatan Cimenyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan target IKU yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimenyan

Bagian ini menunjukkan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di jabarkan dalam program,kegiatan dan sub kegiatan dalam menjalankan pemerintahan serta menjalankan mandatori dari pemerintah pusat maupun daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini mengemukakan analisis terhadap rancangan awal/pagu indikatif terhadap kesesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan .

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Memuat tentang usulan program dan kegiatan dari masyarakat desa dan kelurahan yang ada diwilayah kecamatan Cimenyan yang terselenggara dalam kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan. Usulan tersebut akan di akomodir dalam Renja Dinas terkait apabila sesuai dengan pagu dan kriteria teknis yang telah ditentukan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini dikemukakan keterkaitan antara kebijakan nasional dan daerah yang di implementasikan kedalam program kegiatan di kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Bagian ini mengemukakan apa saja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cimenyan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Program dan Kegiatan

Bagian ini mengemukakan apa saja yang akan menjadi Program,Kegiatan dan sub kegiatan satu tahun kedepan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan rencana kerja serta pendanaan dan prakiraan maju tahun 2026 Kecamatan Cimenyan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimenyan dalam satu tahun mendatang.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimenyan sehingga penting diatur dalam Peraturan Bupati. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberikan gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen Renja sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen Renja sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) kecamatan Cimenyan merupakan dokumen yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja, juga sebagai rangkaian proses perubahan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Cimenyan dalam mencapai Misi ke-4 Kabupaten Bandung yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”. Renja Kecamatan Cimenyan Tahun 2025 diharapkan akan menjadi pendorong dalam perencanaan pembangunan yang pada akhirnya visi Kabupaten Bandung “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dapat terwujud.

6.2. Saran

Perlu adanya sebuah payung hukum berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) sebagai bentuk kebijakan dalam melakukan pembangunan daerah juga sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya.